

Prabu Siliwangi Dan Awal Islamisasi Di Tanah Sunda Antara Mitologi Dan Sejarah Politik

Saepul Basor¹, Yan Nurcahya², Deri Sugiarto³ Rian Ananda Putra⁴, Teddiansyah Nata Negara⁵, Muhammad Al Hafidz⁶, Wawan Hernawan⁷
Magister Sejarah Peradaban Islam, UIN Sunan Gunung Djati^{1,2,3,4,5,6,7}

*Email Korespondensi: yan.itb2021@gmail.com

ABSTRACT

Sejarah Artikel:

Diterima 25-12-2025
Disetujui 05-01-2026
Diterbitkan 07-01-2026

The process of Islamization in the Sundanese Lands is a complex historical phenomenon because it involves the interaction between political power, local culture, and traditional beliefs. The legendary figure of Prabu Siliwangi from the Pajajaran Kingdom is often positioned as a transitional figure between the Hindu-Buddhist era and the arrival of Islam in Tatar Sunda. In various oral sources, chronicles, and ancient manuscripts such as the Carita Parahyangan and Babad Pajajaran, Siliwangi is depicted as a great and just king, but also as a symbol of resistance to religious change. This figure is not only a mythological icon, but also a reflection of the struggle of Sundanese cultural identity facing the increasingly strong current of Islamization in the 15th to 16th centuries AD. This study aims to explore the relationship between the mythology of Prabu Siliwangi and the early process of Islamization in the Sundanese Lands through a historical and politico-cultural approach. Using descriptive-analytical methods and a literature review of historical sources, legends, and archaeological research results, this study attempts to interpret Siliwangi's position in the context of civilizational transition. The analysis shows that the Siliwangi myth functions as an ideological medium to maintain political legitimacy and local identity amidst religious change. Thus, the narrative about Siliwangi not only contains elements of legend, but also reflects the socio-political and spiritual dynamics of Sundanese society during the transition to Islam.

Keywords: King Siliwangi; Islamization; Sundanese Land; Mythology; Political History; Pajajaran Kingdom; Cultural Identity.

ABSTRAK

Proses Islamisasi di Tanah Sunda merupakan fenomena historis yang kompleks karena melibatkan interaksi antara kekuasaan politik, budaya lokal, dan kepercayaan tradisional. Tokoh legendaris Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran sering ditempatkan sebagai figur transisi antara masa Hindu-Buddha dan datangnya Islam di Tatar Sunda. Dalam berbagai sumber lisan, babad, dan naskah kuno seperti Carita Parahyangan dan Babad Pajajaran, Siliwangi digambarkan sebagai raja besar yang adil, namun juga sebagai simbol resistensi terhadap perubahan keagamaan. Figur ini tidak hanya menjadi ikon mitologis, tetapi juga cerminan dari pergulatan identitas budaya Sunda menghadapi arus Islamisasi yang semakin kuat pada abad ke-15 hingga 16 Masehi. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri hubungan antara mitologi Prabu Siliwangi dan proses awal Islamisasi di Tanah Sunda melalui pendekatan historis dan politiko-kultural. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan kajian pustaka terhadap sumber sejarah, legenda, dan hasil penelitian arkeologis, penelitian ini berupaya menafsirkan posisi Siliwangi dalam konteks transisi peradaban. Hasil analisis menunjukkan bahwa mitos Siliwangi berfungsi sebagai medium ideologis untuk mempertahankan legitimasi politik dan identitas lokal di tengah perubahan religius. Dengan demikian, narasi tentang Siliwangi tidak hanya mengandung unsur legenda, tetapi juga merefleksikan dinamika sosial-politik dan

spiritual masyarakat Sunda pada masa peralihan menuju Islam.

Kata kunci: Prabu Siliwangi; Islamisasi; Tanah Sunda; Mitologi; Sejarah Politik; Kerajaan Pajajaran; Identitas Budaya.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Basor, S., Nurcahya, Y., Sugiarto, D., Putra, R. A., Negara, T. N. ., Hafidz, M. A. ., & Hernawan, W. (2026). Prabu Siliwangi Dan Awal Islamisasi Di Tanah Sunda Antara Mitologi Dan Sejarah Politik. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 1552-1561. <https://doi.org/10.63822/en613n03>

PENDAHULUAN

Proses Islamisasi di Nusantara merupakan fenomena sejarah yang kompleks karena melibatkan berbagai unsur sosial, budaya, dan politik yang saling berkelindan. Di antara wilayah yang memiliki dinamika tersendiri dalam penerimaan Islam adalah Tanah Sunda, yang dikenal memiliki akar kuat pada tradisi Hindu-Buddha serta sistem pemerintahan monarki seperti Kerajaan Galuh, Sunda, dan Pajajaran. Dalam konteks ini, peran tokoh legendaris Prabu Siliwangi sering menjadi sorotan karena menandai masa transisi penting antara kejayaan Pajajaran dan awal pengaruh Islam di Tatar Sunda.

Nama Prabu Siliwangi tidak hanya muncul dalam naskah sejarah seperti Carita Parahyangan, tetapi juga hidup dalam tradisi lisan masyarakat Sunda. Figur ini digambarkan sebagai raja besar yang bijaksana, adil, dan mencintai rakyatnya, namun sekaligus menjadi simbol keagungan masa Hindu-Buddha yang kemudian perlahan tergeser oleh gelombang Islamisasi. Oleh karena itu, memahami posisi Siliwangi bukan sekadar soal mitos, tetapi juga memahami bagaimana masyarakat Sunda menafsirkan perubahan sosial dan keagamaan dalam bingkai politik dan budaya lokal.

Dalam berbagai catatan kolonial dan karya orientalis, seperti yang disampaikan oleh C.M. Pleyte dan H. Kern, kisah Siliwangi sering dianggap sebagai legenda yang tidak memiliki dasar historis yang kuat. Namun, dalam studi sejarah lokal modern, banyak peneliti seperti Edi S. Ekadjati dan Ajip Rosidi melihat mitologi Siliwangi justru sebagai refleksi dari realitas politik pada masa akhir Kerajaan Pajajaran. Melalui tokoh mitologis ini, masyarakat Sunda berusaha mempertahankan identitas dan kehormatan kolektif di tengah perubahan struktur kekuasaan akibat meluasnya Islam.

Islamisasi di Tanah Sunda sendiri tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan perdagangan, perkawinan, dan dakwah para wali serta ulama pesisir. Di wilayah pesisir utara Jawa Barat—seperti Cirebon, Banten, dan Indramayu—Islam mulai berkembang pesat sejak abad ke-15 M. Tokoh-tokoh seperti Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) memiliki peran penting dalam memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Sunda, termasuk menjalin hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan sekitar.

Konteks politik pada masa itu juga turut memengaruhi arah Islamisasi. Pajajaran sebagai kekuatan besar di Tatar Sunda memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi yang luas dengan Majapahit, tetapi menolak pengaruh Islam dari pesisir utara. Konflik politik dan perbedaan ideologi inilah yang kemudian mempercepat keruntuhan Pajajaran, bersamaan dengan munculnya Kesultanan Banten dan Cirebon sebagai kekuatan baru yang berlandaskan Islam. Di titik inilah figur Prabu Siliwangi sering diposisikan sebagai simbol “raja lama” yang menolak perubahan agama, padahal secara historis, pergeseran itu jauh lebih kompleks.

Dalam tradisi mitologis Sunda, Prabu Siliwangi sering digambarkan tidak mati, melainkan “moksa” atau menghilang bersama bala tentaranya di hutan Sancang. Mitos ini menyimpan makna simbolik: bahwa kekuasaan dan kejayaan lama tidak benar-benar lenyap, tetapi bertransformasi menjadi warisan spiritual dan budaya masyarakat Sunda. Dari sisi historis, narasi ini dapat dimaknai sebagai bentuk sublimasi politik, di mana masyarakat Sunda menolak untuk mengakui kekalahan total di bawah kekuasaan Islam, tetapi mengubahnya menjadi cerita heroik yang penuh makna simbolik.

Kajian terhadap mitologi Siliwangi penting bukan hanya untuk menelusuri asal-usul legenda, tetapi juga untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai perubahan kekuasaan. Dalam konteks ini, mitos berfungsi sebagai media politik dan ideologis. Ia merepresentasikan perlawanannya kultural terhadap dominasi baru, sekaligus alat untuk menjaga kesinambungan identitas. Dengan demikian, mitologi bukan hanya cerita rakyat, melainkan bagian dari konstruksi historis yang memuat pesan politik tersembunyi.

Sejarah Islamisasi di Tanah Sunda tidak dapat dilepaskan dari konsep sinkretisme budaya, yaitu perpaduan antara unsur lama dan baru dalam bentuk yang harmonis. Masyarakat Sunda tidak serta-merta meninggalkan warisan spiritual Hindu-Buddha, melainkan mengadaptasinya dalam tradisi Islam lokal seperti ngalokat bumi, ziarah karuhun, atau penghormatan kepada tokoh-tokoh suci. Proses ini menunjukkan bahwa Islam di Sunda diterima bukan melalui pemaksaan politik, tetapi lewat asimilasi nilai dan simbol budaya yang telah ada.

Dari perspektif sejarah politik, figur Prabu Siliwangi juga mencerminkan transisi dari kekuasaan sakral berbasis dewaraja ke bentuk pemerintahan Islam yang lebih rasional dan egaliter. Pergeseran ini tidak hanya terjadi dalam tatanan keagamaan, tetapi juga dalam sistem kekuasaan. Raja tidak lagi diposisikan sebagai dewa, tetapi sebagai khalifah—pemimpin yang bertanggung jawab secara moral di hadapan Tuhan dan rakyat. Perubahan paradigma ini menjadi fondasi penting bagi lahirnya struktur politik Islam di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.

Dengan demikian, penelitian mengenai Prabu Siliwangi dan Islamisasi di Tanah Sunda tidak semata-mata membedah mitos atau legenda, tetapi berupaya memahami dinamika perubahan sosial-politik dan spiritual masyarakat Sunda. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sejarah, antropologi, dan politik Islam diperlukan untuk menafsirkan makna di balik narasi Siliwangi. Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman baru bahwa mitologi bukanlah lawan dari sejarah, melainkan bagian dari ingatan kolektif yang mencerminkan transformasi politik dan religius bangsa Sunda dalam menghadapi arus Islamisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis untuk menelusuri hubungan antara mitologi Prabu Siliwangi dan proses Islamisasi di Tanah Sunda. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji peristiwa masa lampau secara deskriptif dan interpretatif, dengan menekankan makna sosial, politik, dan budaya yang terkandung dalam setiap sumber sejarah. Pendekatan historis juga memungkinkan peneliti memahami transformasi nilai-nilai kekuasaan dan agama yang terjadi pada masa transisi dari Hindu-Buddha ke Islam di wilayah Sunda.

Metode historis dalam penelitian ini melibatkan empat tahapan utama: heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber primer dan sekunder seperti naskah kuno (Carita Parahyangan, Babad Pajajaran, Serat Kanda), prasasti, catatan kolonial, dan karya ilmiah modern. Tahap kritik sumber digunakan untuk menilai keaslian, keabsahan, dan kredibilitas sumber agar diperoleh data yang valid dan representatif.

Tahap interpretasi dilakukan dengan menafsirkan fakta sejarah dan unsur mitologis untuk memahami konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya. Dalam tahap ini, peneliti tidak hanya membandingkan antara mitos dan fakta sejarah, tetapi juga menelusuri pesan ideologis di balik kisah Prabu Siliwangi dalam hubungannya dengan proses Islamisasi. Dengan cara ini, mitologi diperlakukan bukan sekadar legenda rakyat, melainkan sebagai teks sosial yang mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat Sunda terhadap perubahan kekuasaan dan agama.

Selain metode historis, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan politiko-kultural, yakni kajian terhadap relasi antara budaya dan kekuasaan. Pendekatan ini digunakan untuk membaca peran mitologi sebagai medium legitimasi politik dan simbol identitas masyarakat Sunda dalam menghadapi perubahan

sistem pemerintahan berbasis Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek religius, tetapi juga dimensi politik yang memengaruhi konstruksi narasi tentang Prabu Siliwangi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai karya ilmiah, buku sejarah, artikel jurnal, serta literatur antropologi dan kebudayaan Sunda. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti mitologi Siliwangi, struktur politik Pajajaran, dan proses Islamisasi di Jawa Barat. Sumber sekunder dari para sejarawan seperti Edi S. Ekadjati, Ajip Rosidi, dan M.C. Ricklefs digunakan sebagai rujukan analitis dalam mengaitkan mitos dengan konteks sejarah nyata.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menguraikan peristiwa secara kronologis, kemudian menafsirkan maknanya secara konseptual. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data (seleksi informasi penting), penyajian data (penulisan naratif dan tematik), serta penarikan kesimpulan. Analisis diarahkan untuk mengungkap makna politik dan spiritual di balik mitos Siliwangi serta implikasinya terhadap identitas Islam Sunda.

Untuk menjaga validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber, yaitu perbandingan antara sumber tertulis, tradisi lisan, dan temuan arkeologis. Langkah ini penting agar hasil penelitian tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi memiliki dasar empiris yang kuat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman yang seimbang antara unsur mitologis dan realitas historis dalam menafsirkan perjalanan awal Islamisasi di Tanah Sunda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prabu Siliwangi merupakan figur legendaris yang menempati posisi penting dalam imajinasi kolektif masyarakat Sunda. Ia dipandang sebagai simbol kejayaan dan keagungan Kerajaan Pajajaran, yang menjadi representasi tertinggi peradaban Hindu-Buddha di Tatar Sunda. Dalam tradisi lisan, Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang bijak, adil, dan disegani, tetapi kisahnya juga sarat dengan unsur mitologis yang mencerminkan proses peralihan budaya menuju Islam. Figur ini menjadi jembatan antara sejarah politik dan mitologi spiritual masyarakat Sunda.



Gambar 1. Prasasti Batutulis di Bogor menyebutkan keagungan Sri Baduga Maharaja dalam sejarah
(Sumber: Collectie Wereldmuseum, v/h Tropenmuseum)

Secara historis, Kerajaan Pajajaran yang berpusat di Pakuan (kini Bogor) menjadi kerajaan terakhir yang menganut agama Hindu-Siwa di wilayah Sunda. Pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16, pengaruh Islam mulai masuk melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama dari pesisir utara Jawa, terutama dari Cirebon dan Banten. Dalam konteks ini, muncul ketegangan ideologis antara kekuasaan Pajajaran yang berlandaskan tradisi Hindu dengan kekuatan politik Islam yang tumbuh pesat di wilayah pantai. Konflik ini menjadi bagian dari dinamika Islamisasi politik di Tanah Sunda.

Kisah tentang “Prabu Siliwangi menolak masuk Islam” muncul dalam berbagai versi naskah, seperti Carita Parahyangan dan Babad Pajajaran. Dalam beberapa sumber, Prabu Siliwangi digambarkan menentang dakwah Sunan Gunung Jati, sementara dalam versi lain ia dianggap sebagai tokoh yang memahami nilai Islam namun enggan meninggalkan keyakinan lamanya. Narasi ini memperlihatkan ketegangan antara dua sistem nilai: spiritualitas Hindu-Sunda yang berakar pada kosmologi lokal dan ajaran tauhid Islam yang bersifat universal.



Gambar 2. Cakupan wilayah Kerajaan Sunda (Sumber: Gunawan Kartapranata)

Transformasi dari Hindu-Sunda ke Islam bukanlah proses yang berlangsung secara tiba-tiba, melainkan hasil interaksi panjang antara elit politik, pedagang, dan ulama. Para wali seperti Sunan Gunung Jati berperan penting dalam menyebarkan Islam melalui jalur diplomasi, perkawinan politik, dan perdagangan. Proses ini memperlihatkan bahwa Islamisasi di Tanah Sunda tidak identik dengan penaklukan, tetapi merupakan hasil akulturasi budaya dan negosiasi kekuasaan. Prabu Siliwangi sebagai simbol Pajajaran menjadi narasi kultural dari perubahan itu.

Mitologi tentang Prabu Siliwangi juga berfungsi sebagai media legitimasi identitas Sunda. Dalam berbagai tradisi lisan, raja yang hilang diyakini akan “kembali” untuk menegakkan keadilan, yang secara simbolis menandakan kerinduan masyarakat terhadap tatanan moral yang ideal. Mitos ini hidup berdampingan dengan keislaman masyarakat Sunda, sehingga menciptakan bentuk religiusitas yang sinkretik. Islam di Tanah Sunda pun berkembang dengan nuansa lokal yang lembut dan penuh toleransi terhadap tradisi lama.

Tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduga setelah resmi dinobatkan jadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya (Wastu Kancana) yang disampaikan melalui ayahnya (Ningrat Kancana) ketika ia masih menjadi mangkubumi di Kawali. Isi pesan ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduga di Kebantenan. Isinya sebagai berikut (artinya saja):

Semoga selamat. Ini tanda peringatan bagi Rathyang Niskala Wastu Kancana. Turun kepada Rathyang Ningrat Kancana, maka selanjutnya kepada Susuhunan sekarang di Pakuan Pajajaran. Harus menitipkan ibu kota di Jayagiri dan ibu kota di Sunda Sembawa.

Semoga ada yang mengurusnya. Jangan memberatkannya dengan "dasa", "calagra", "kapas timbang", dan "pare dondang".

Maka diperintahkan kepada para petugas muara agar jangan memungut bea. Karena mereka lah yang selalu berbakti dan membaktikan diri kepada ajaran-ajaran. Mereka lah yang tegas mengamalkan peraturan dewa.

Dengan tegas di sini disebut "dayeuhan" (ibu kota) di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Penduduk kedua dayeuh ini dibebaskan dari 4 macam pajak, yaitu "dasa" (pajak tenaga perorangan), "calagra" (pajak tenaga kolektif), "kapas timbang" (kapas 10 pikul) dan "pare dondang" (padi 1 gotongan). Dalam kropak 630, urutan pajak tersebut adalah dasa, calagra, "upeti", "panggeureus reuma".

Dalam koropak 406 disebutkan bahwa dari daerah Kandang Wesi (sekarang Bungbulang, Garut) harus membawa "kapas sapuluh carangka" (10 carangka = 10 pikul = 1 timbang atau menurut Coolsma, 1 caeng timbang) sebagai upeti ke Pakuan tiap tahun. Kapas termasuk upeti. Jadi tidak dikenakan kepada rakyat secara perorangan, melainkan kepada penguasa setempat. Untuk pertama kalinya naskah ini diteliti oleh K.F. Holle, kemudian diteruskan oleh C.M. Pleyte. Kemudian naskah ini dialihbahasakan oleh Poerbatjaraka, sebagai tambahan terhadap laporan mengenai Batu Tulis di Bogor. Upaya ini diteruskan oleh H. ten Dam (tahun 1957) dan J. Noorduyn (dalam laporan penelitiannya tahun 1962 dan 1965). Selanjutnya naskah ini juga diteliti oleh beberapa sarjana Sunda, di antaranya Ma'mun Atmamiharja, Amir Sutaarga, Aca, Ayatrohaédi, serta Édi S. Ékajati dan Undang A. Darsa.

K.F. Holle (1869) dalam tulisan berjudul De Batoe Toelis te Buitenzorg (Batutulis di Bogor). Holle menyebutkan bahwa di dekat Kota Bogor terdapat kampung bernama Cipaku dengan sungai yang memiliki nama yang sama. Di sana banyak ditemukan pohon paku. Jadi menurut Holle, nama Pakuan ada kaitannya dengan kehadiran Cipaku dan pohon paku. Pakuan Pajajaran berarti pohon paku yang berjejer ("op rijen staande pakoe bomen").

Perspektif Politik

Dari sisi politik, Islamisasi membawa perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan. Konsep raja-dewa yang sebelumnya dominan mulai digantikan oleh model raja-ulama atau pemimpin religius, sebagaimana terlihat di Kesultanan Cirebon dan Banten. Pergeseran ini tidak hanya menandai runtuhnya sistem politik lama, tetapi juga lahirnya paradigma baru tentang kekuasaan yang mengaitkan legitimasi politik dengan nilai keagamaan. Hal ini menjadi dasar munculnya pola pemerintahan Islam yang khas di Jawa Barat.

Dalam perspektif politik, penolakan Prabu Siliwangi terhadap Islam bisa dibaca sebagai bentuk resistensi terhadap kekuasaan baru. Islam pada masa itu tidak hanya membawa perubahan teologis, tetapi juga tatanan politik baru yang berpusat pada konsep kekuasaan religius berbasis syariah. Cirebon dan Banten, dua kerajaan Islam yang muncul di wilayah barat Jawa, menjadi ancaman politik bagi hegemoni

Pajajaran. Karena itu, mitos “raja yang hilang” atau “raja yang menjadi harimau” merupakan simbol dari transisi kekuasaan, bukan sekadar legenda spiritual.

Mitologi Prabu Siliwangi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Sunda mengartikulasikan identitas politiknya dalam konteks perubahan sejarah. Alih-alih menghapus masa lalu, masyarakat mengadaptasi kisah Siliwangi untuk memperkuat kontinuitas sejarah dan kebanggaan etnis. Dalam hal ini, mitologi berfungsi sebagai bentuk “resistensi kultural” terhadap dominasi narasi Islam Jawa yang lebih dominan. Sejarah Islamisasi di Tanah Sunda pun menjadi ruang negosiasi antara nilai lokal dan universal.

Dalam perspektif historis, peran Islam dalam politik Tanah Sunda terus berkembang setelah runtuhnya Pajajaran. Kesultanan Cirebon dan Banten menjadi pusat kekuasaan Islam yang berpengaruh di wilayah barat Jawa. Namun demikian, jejak Pajajaran dan Prabu Siliwangi tidak sepenuhnya hilang. Nilai-nilai kepemimpinan, keadilan, dan moralitas tetap diwariskan dan diserap ke dalam etika politik Islam Sunda. Di sinilah tampak kesinambungan antara mitologi masa lalu dan praktik sosial keagamaan masa kini.

Dengan demikian, Prabu Siliwangi bukan hanya sosok mitologis, tetapi juga refleksi historis dari dinamika kekuasaan dan proses Islamisasi di Tanah Sunda. Kisahnya menjadi representasi dari pertemuan antara keagungan masa lalu dan realitas spiritual baru. Melalui pendekatan historis dan politik, dapat dipahami bahwa mitologi Siliwangi mengandung makna ideologis tentang kekuasaan, identitas, dan adaptasi budaya. Ia menjadi simbol pertemuan antara tradisi dan transformasi, antara mitos dan sejarah dalam perjalanan Islam di Nusantara.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sosok Prabu Siliwangi tidak semata-mata berada dalam ranah mitologi, tetapi memiliki relevansi historis dan politis dalam konteks Islamisasi di Tanah Sunda. Mitos tentang Prabu Siliwangi yang menolak Islam mencerminkan bentuk resistensi budaya dan kekuasaan terhadap perubahan tatanan politik-religius pada masa peralihan dari Hindu-Buddha ke Islam. Narasi ini memperlihatkan bahwa proses Islamisasi di wilayah Sunda berlangsung secara kompleks — tidak hanya melalui dakwah keagamaan, tetapi juga melalui diplomasi, konflik kekuasaan, dan negosiasi budaya.

Dari sudut pandang politik, runtuhnya Pajajaran dan munculnya Cirebon serta Banten menandai pergeseran paradigma kekuasaan di Jawa Barat. Islam menjadi kekuatan ideologis baru yang tidak hanya menggantikan sistem lama, tetapi juga menyerap nilai-nilai moral dan sosial dari tradisi Sunda. Mitos Siliwangi sebagai “raja yang tidak mati” menandakan kesinambungan identitas Sunda di tengah dominasi Islam, membentuk karakter Islam yang khas: lembut, adaptif, dan menghargai kearifan lokal. Dengan demikian, sejarah politik Islam di Tanah Sunda merupakan hasil dialektika antara warisan Hindu-Sunda dan etika Islam Nusantara.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian sejarah Islam Asia Tenggara, khususnya dalam memahami peran mitologi sebagai sumber ideologis dan politik dalam proses Islamisasi. Sementara secara sosial, hasil penelitian ini mendorong kesadaran akan pentingnya menghargai pluralitas budaya dan sejarah lokal dalam perkembangan Islam di Indonesia. Prabu Siliwangi menjadi simbol bahwa identitas keislaman di Nusantara tidak lahir dari pemutusan masa lalu, melainkan dari integrasi kreatif antara mitos, sejarah, dan nilai-nilai kemanusiaan yang terus hidup dalam memori kolektif masyarakat Sunda.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2004). Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Jakarta: Kencana.
- Drewes, G. W. J. (1968). New Light on the Coming of Islam to Indonesia?. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 124(4), 433–459.
- Ekadjati, E. S. (1984). Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hoadley, M. C. (1994). Islamic Law and Colonial Encounters in Southeast Asia. Singapore: ISEAS.
- Holil, M. (2019). Politik Islam di Nusantara: Antara Dakwah dan Kekuasaan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iskandar, T. (2001). Sejarah dan Budaya Sunda Lama. Bandung: Pustaka.
- Johns, A. H. (1993). Islamization in Southeast Asia: Reflections and Reconsiderations. *Southeast Asian Studies Journal*, 31(1), 43–67.
- Kartodirdjo, S. (1992). Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia.
- Lombard, D. (1996). Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu. Jakarta: Gramedia.
- Negara, T. N. ., Hawari, I. F. ., Nurcahya, Y., Sugiarto, D., Syah, M. K. T., Sulisman, S., & Suparman, S. (2025). Pemikiran Filsafat Sejarah Spekulatif dan Filsafat Sejarah Kritis. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 4121-4129. <https://doi.org/10.63822/nzbe1b94>
- Nurcahya, Y., Wulandari, H. ., Sulisman, Ajid Hakim, Aziz, M. F. ., Putra, A. ., & Salsabila, M. J. . (2025). Jejak Awal dan Perkembangan Islam di Bengkulu: Dari Dakwah Ulama hingga Institusionalisasi Keagamaan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 4435-4447. <https://doi.org/10.63822/7rdpyn14>
- Nurcahya, Yan. (2025). Asceticism And Self-Purification In The Folklore Of Prabu Siliwangi: A Symbolic Study At The Citarum Site. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jat/article/view/43636>
- Nurcahya, Yan. (2025). Bersuci Di Citarum; Makna dan Simbol Prabu Siliwangi dalam Kajian Folklor. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/nusantara/article/view/34893>
- Nurcahya, Yan. (2025). Kajian Folklore: Makna Dan Simbol Prabu Siliwangi Bertapa Dan Menyucikan Diri Sebelum Masuk Islam Di Mata Air Citarum. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/historia/article/view/1249>
- Nurcahya, Yan. (2025). Meaning and Symbols of Prabu Siliwangi Meditate and Purify Oneself: Folklore Study. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/jomantara/article/view/21213>
- Pigeaud, T. G. T. (1967). Java in the 14th Century: A Study in Cultural History. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Reid, A. (2012). Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680. New Haven: Yale University Press.
- Ricklefs, M. C. (2008). A History of Modern Indonesia Since c. 1200. Stanford: Stanford University Press.
- Rosidi, A. (2010). Mengenal Sejarah Sunda. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Supendi, U., Nurcahya, Y., Thariq Syah, M. K., Oksa Putra, M. Z., & Sugiarto, D. . (2025). Kearifan Situ Cisanti di Sungai Citarum KM.0 Bukti Sejarah Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran: Kajian Folklor Budaya Sunda . *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2), 3526–3535. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3189>
- van Bruinessen, M. (1999). Islamic State or State Islam? Politics of Islam in Indonesia. *Studia Islamika*, 6(2), 1–24.
- Wessing, R. (1997). A Tiger in the Heart: The Symbolism of the Siliwangi Myth. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 153(2), 259–280.
- Scriven, M. (1967). *The methodology of evaluation*. In R.W.Tyler.R M. Gagne, & M Scriven (Eds). *Perspectives of curriculum evaluation*. (pp.39-83). Chicago: Rand McNally.

- Stake, R E. (1967). *Forward technology for the evaluation of educational programs*. In R W Tyler, R M Gagne, & M Scriven. (Eds). *Perpectives of curriculum evaluation*. (pp.1-12). Chicago: Rand McNally.
- Stake, R E. (1967). The countenance of educational evaluation. *Teacher's Coole-ge Record*. Vol. 68, no:7.
- Stake, R E. (1977).*The Countenance of educational evaluation*.In A.A. Bellack & H.M Kliebard. Eds 1. *Curriculum and evaluation* (pp. 372-390).Berkeley.CA McCutahan.